BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam fenomena hubungan internasional, isu lingkungan menjadi perhatian masyarakat internasional karena nyata keberadaanya. Munculnya isu lingkungan dalam studi hubungan internasional menjadi cerminan dari perkembangan politik global bawasanya lingkungan dapat mempengaruhi berbagai aspek lainya. Dengan adanya globalisasi membuat perkembangan perspektif masyarakat internasional menjadi semakin beragam. Hubungan Internasional tidak lagi hanya mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan namun mulai merambah pada isu lingkungan.

Isu lingkungan menjadi perhatian dan perbicangkan karena munculnya fenomena-fenomena alam yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia akibat adanya laju pertumbuhan penduduk sehingga memicu ketidakseimbangan antara manusia dengan alam. Hal-hal negatif yang terjadi adalah bencana alam. Bencana alam terjadi seperti tamu yang tak diundang karena bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dampak negatif dari permasalahan lingkungan tidak hanya dirasakan dalam skala nasional namun juga dalam skala internasional. Dampak negatif ini dirasakan melalui perubahan iklim yang kini mulai terasa. Dampak-dampak negatif lainya seperti, banjir dan kabut asap. Banjir mengakibatkan kelaparan, penyebaran penyakit, longsor, erosi, pencemaran lingkungan, merusak sarana dan prasarana, melumpuhkan jalur transportasi, terhambatnya aktifitas, dan kerugian bagi makhluk hidup, baik materi maupun nonmateri hingga kematian.

Kabut asap menyebabkan penyebaran penyakit, mengganggu jalur transportasi udarah hingga darat. Kabut asap juga tidak mengenal batasan sehingga menjadi pemicu rusaknya hubungan lintas negara.

Melestarikan lingkungan hidup menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab seluruh manusia karena, kerusakan lingkungan adalah ulah manusia dan dampaknya juga dirasakan bersama. Pelestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama karena keseimbangan bumi menjadi kebutuhan. Setiap orang harus melakukan upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang.

Isu lingkungan menjadi semakin kuat sama halnya dengan isu keamanan dan pandangan kaum realis seperti *state centrism* yang menganggap bahwa negara adalah pelaku utama dari suatu hal atau permasalahan dimana negara berperan sebagai aktor utama yang mendominasi dunia. Pendekatan *state centrism* tidak menganggap isu lingkungan sebagai isu yang dapat mempengaruhi dunia namun seiring perkembangan zaman pandangan ini mulai memudar yang ditandai dengan mulainya berkembang isu lingkungan yang menjadi fokus perhatian masyarakat dunia. Pasca perang dunia ke II isu lingkungan menjadi perhatian para ahli yang merasa prihatin dengan kerusakan lingkungan yang perlahan-lahan mulai terasa guna melestarikan lingkungan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Perhatian masyarakat dunia mengenai pentingnya pelestarian lingkungan semakin menguat ditandai melalui peredaran buku dan artikel, seperti *‘Silent*

Spring' yang ditulis oleh Rachel Carson (1962) dan '*The Tragedy of the Commons'* yang ditulis oleh Garret Hardin (1968). Akibat kemunculan buku dan artikel tersebut membuat masyarakat internasional tidak lagi tinggal diam. Perhatian mereka mulai diarahkan kepada isu lingkungan.yang terfokus pada konservasi alam di lingkungan biofisik yang mencakup isu manajemen keanekaragaman hayati, konsevasi tanah, konservasi hutan, polusi air, polusi udara, degradasi tanah serta desertifikasi dan manusia dianggap menjadi penyebab utama akar permasalahan yang terjadi tersebut. Akibat perdebatan ini, dibarat muncul dua pemikiran sekolah yang prinsipal terkait penyebab degradasi lingkungan. Pertama. Pandangan ini menyalahkan ketamakan dan pertumbuhan ekonomi sebagai penyebab degradasi lingkungan. Kedua, menyalahkan pertumbuhan populasi. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industrialisasi, permasalahan penggunaan lahan sudah umum terjadi . Pemikiran secara intuitif dalam penggunaan lahan sudah sejak lama dilakukan , tetapi penggunaan secara lebih efisien dan dengan perencanaan baru terwujud jelas setelah Perang Dunia I. (Sandy 1977:24)

Selain itu ada juga *The Club of Rome* merupakan asosiasi internasional yang terdiri dari 100 ilmuan, eksekutif bisnis, pelajar yang memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap pembangunan global. *The Club of Rome* menjadi kelompok yang menarik perhatian dunia karena apa yang dipublikasikan sangat fenomenal. Publikasi pertama mereka yaitu buku yang berjudul *'The Limits to Growth'* pada tahun 1972. Didalam artikel ini dipaparkan mengenai lima variabel analisis yaitu teknologi, populasi, nutrisi, sumber daya alam, dan lingkungan. Kesimpulan utama adalah apabila tren pada saat itu masih berlangsung, sistem global akan

melampaui batas dan runtuh pada tahun 2000, dimana pembangunan ekonomi dianggap sebagai faktor kerusakan lingkungan. Hal ini mendapatkan banyak kritik. Terbitnya buku '*The Limits to Growth'* memperpanjang perdebatan mengenai permasalahan lingkungan.

Pada tahun 1970an munculah teori-teori serta konsep-konsep yang ikut mempengaruhi meningkatnya perhatian atas isu lingkungan. Hal ini diawali dengan teori *green politics* atau teori politik hijau. Teori politik hijau bersifat global karena isu yang diangkat adalah isu lingkungan. Isu lingkungan bersifat global karena ketika berbicara mengenai lingkungan maka kedaulatan suatu negara bukanlah hambatan. Sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tanggal 15 Juni 1972 maka masalah lingkungan ramai dibicarakan. Di Indonesia, kepedulian terhadap masalah lingkungan hidup dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei 1972 (Syaprillah, 2016 : 34).

Pada tahun 1972 diadakanlah *The United Nations Conference on the Human Environment (UNCED)* yang telah mendorong lingkungan menjadi isu besar di kanca internasional. Dalam disiplin ilmu hubungan internasional sendiri, isu lingkungan belum menjadi pembahasan khusus hingga pada akhir tahun 1980 melalui adanya komitmen yang besar dari masyarakat dan pemerintah mengenai lingkungan serta adanya UNCED pada tahun 1992. Sejak itu isu lingkungan menjadi kajian khusus dalam disiplin ilmu hubungan internasional.

Ada juga beberapa hal yang menjadi alasan mengapa isu lingkungan menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan internasional. Pertama,

beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. Kedua, beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Contohnya jika pembuangan limbah dilakukan di laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut. Ketiga, banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah. Keempat, meskipun permasalahnnya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara. Kelima, permasalahan lingkungan berkaitan juga dengan ekonomi-sosial maupun politik (Greene, 2001:387-414).

Pesatnya pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan terus berkembang hingga munculah istilah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development.* Pembangunan berkelanjutan mencerminkan adanya kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Pada tahun 2005, KTT dunia menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, lagi menganggap bahwa pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan mudah untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain beranggapan bahwa, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. Menurut Brundtland Report dari PBB, pada tahun 1987 *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan ini memiliki prinsip, yaitu "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan". Pembangunan berkelanjutan harus dicapai guna memperkecil resiko kehancuran lingkungan.

Dari penelitian yang dilakukan, tanah diseluruh dunia mengalami degradasi sebesar 15%. Setiap tahunya 6.000 jenis hewan punah (WRI 2000 : 73). Dalam kurun waktu seratus tahun terakhir, pertumbuhan penduduk melonjak cepat terutama pada negara berkembang. Kenaikan jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, tidak memadainya jaminan sosial pada negara yang bersangkutan, budaya dan keyakinan, urbanisasi, dan diskriminasi terhadap wanita. Faktor tersebut menimbulkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kemiskinan, dan kekurangan air yang tentunya berujung pada masalah kekurangan gizi pada manusia. Masalah-masalah ini tidak dapat terlepas dari aktifitas yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari melalui sistem ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa. Alam berperan sebagai penyedia bahan mentah guna berjalanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak dapat berlangsung jika tidak ada sumber daya alam karena seluruh bahan baku dasar dan energi, baik yang dapat diperbaharui seperti hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti batubara dan minyak bumi, yang menjadi kendaraan bagi terwudnya system ekonomi disediakan oleh alam. Pemanasan global, polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan dan kendaraan, peningkatan gas CFC (*chlorofluorocarbon*) menjadi permasalahan lingkungan yang semakin terasa kehadirannya di tengah masyarakat dunia (Jackson dan Sorensen, 1999: 324). Alam menyediakan semua yang dibutuhkan system ekonomi seperti mengubah kayu menjadi kertas, dan minyak bumi menjadi BBM.

Alam memberikan servis dalam memungkinakan keberlangsungan sistem ekonomi menjalankan aktifitasnya. Dukungan yang diberikan alam dapat berupa regulasi iklim operasi dari siklus air, regulasi dari komposisi gas-gas di atmosfer, siklus nutrisi, dan lainya. Alam juga memberikan manusia nilai kepuasan yang dapat dinikmati secara langsung *(amenity values).* Manusia akan mendapatkan kepuasan dengan melihat langsung atau menikmati keindahan alam misalnya dengan mendaki gunung, memancing dan lainya.

Pembangunan tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam. Namun, eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan justru mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan dan keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan inilah yang menjadi perhatian dan ketertarikan komunitas internasional untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) masalah lingkungan di negara-negara berkembang sebagian besar disebabkan karena eksploitasi lahan yang berlebihan, perluasan penanaman dan penggundulan hutan (Reyntjes 1999 : 5).

Di dalam UU No.23 Tahun 1997, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, di dalam kehidupannya manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, ketika kita bernapas maka kita butuh udara, begitu pula ketika kita hendak makan, maka makanan dan minuman yang kita butuhkan berasal dari lingkungan hidup/alam, sehingga sadar atau tanpa kita sadari, semua hal penting yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita telah disediakan

oleh lingkungan sekitar kita untuk dapat kita pergunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan kita. Dampak dari kerusakan lingkungan sudah kita rasakan. Di Indonesia, Upaya untuk menyelamatkan lingkungan ini telah terkandung dalam UU No.25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah, UU No.4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan juga mengeluarkan peraturan pemerintah RI No.24 tahun 1986 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Kerusakan ekosistem pesisir adalah salah satunya disebabkan oleh manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi hutan bakau yang mempengaruhi ekosistem pesisir. Fungsi hutan bakau dialihkan menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya. Karna pada dasarnya hutan bakau memiliki fungsi ekonomi seperti penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Kegiatan manusia seperti menjala ikan bisa menyebabkan tersangkut dan tercabutnya bibit tanaman bakau. Selain itu, perahu nelayan yang mendarat di sekitar tanaman bakau, bisa merusak bibit tanaman bakau karena menimbulkan ombak yang besar (Bengen, 2001 : 240-257). Hutan bakau merupakan hutan dengan kandungan karbon terpadat di wilayah tropis. Lahan ini menyimpan lebih dari tiga kali rata-rata karbon per hektar hutan tropis daratan (Donato, 2011 : 293-297).

Hutan bakau atau bisa juga disebut Mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ternak masyarakat merupakan faktor

alam dari ketidakberhasilan rehabilitasi hutan bakau. Ternak merupakan ancaman yang serius yang perlu dikendalikan. Dalam jumlah besar, ternak akan merusak tanaman bakau bila melewati lokasi penanaman bakau tersebut. Selain memakan daun, ternak juga sering mencabut tanaman bakau. Faktor alam lain yang dapat menyebabkan ketidakberhasilan adalah faktor pasang air laut tertinggi yang dapat mencabut akar-akar mangrove yang masih rentan terhadap hempasan ombak. Lokasi penanaman mangrove yang selalu tergenang air dan membujur ke arah ombak menyebabkan pasang yang terjadi dapat mengakibatkan kematian bibit-bibit mangrove.

Di Indonesia hutan bakau memiliki luas antara 2.5 hingga 4.5 juta hektar yang mana hal ini merupakan hutan bakau terluas di dunia, melebihi Brazil, Nigeria dan Australia.(Noor dkk, 2012 : 2). Kekhasan ekosistem bakau Indonesia adalah memiliki keragaman jenis yang tertinggi di dunia. Sebaran bakau di Indonesia tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Namun demikian, kondisi bakau Indonesia baik secara kualitatif dan kuantitatif terus menurun dari tahun ke tahun. Luas ekosistem bakau di Indonesia mencapai 75% dari total bakau di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas bakau di dunia namun kondisinya kritis. Sejak 1980, Indonesia kehilangan lebih dari seperempat hutan bakaunya. Sisa 3,1 juta hektar tersebar secara acak di sepanjang 55.000 garis pantai, tempat yang cocok untuk bakau. Pada tahun 1982, hutan bakau di Indonesia tercatat seluas 4,25 juta ha sedangkan pada tahun 1993 menjadi 3,7 juta ha, dimana sekitar 1,3 juta ha sudah disewakan kepada 14 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Kusmana (1995) diketahui bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1982 – 1993 (11 tahun), luas hutan bakau turun

sebesar 11,3 % (4,25 juta ha pada tahun 1982 menjadi 3,7 juta ha pada tahun 1993) atau 1 % per tahun.(https://www.academia.edu /9653242/ diakses pada 27/02/16). Data *Wetlands International* sebagaimana yang diungkapkan Drs. Pramudji, M.Sc. dalam orasi pengukuhan Profesor Risetnya 9 Desember 2010, memperlihatkan bahwa luas hutan bakau di Indonesia pada tahun 2005 tinggal sekitar 1,5 juta ha.

Ekosistem pesisir merupakan suatu sistem yang kompleks meliputi organisme tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan memegang peranan penting dalam menjaga dan melindungi garis pantai dari proses erosi maupun abrasi. Keberadaan hutan bakau dengan beragam fungsi dan manfaatnya sangat penting dalam mendukung aktivitas pembangunan. Semakin terbatasnya wilayah daratan ditengah kebutuhan ruang yang semakin tinggi menjadikan kawasan pesisir termasuk di dalamnya hutan bakau menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu hutan bakau merupakan lumbung besar penyimpan karbon. (http://wetlands.org/ diakses pada 27/02/16)

Hutan bakau ditemukan di banyak wilayah Indonesia. Hutan bakau terus mengalami penurunan. Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami kerusakan. Pada 2011, Badan Pengelolah Hutan Mangrove (BPHM) menyatakan bahwa hutan mangrove di NTT mencapai 40.614,11 ha, jumlah tersebut tersebar pada semua wilayah kabupaten - kota dengan luasan yang beragam. Beragam bentuk pemanfaatan mangrove seperti untuk pemukiman, lahan pertanian maupun peruntukan lain dengan mudah dapat dijumpai pada wilayah pesisir di NTT. Konversi mangrove menjadi area budidaya tambak maupun penebangan kayu untuk bahan bangunan dan kayu bakar sudah

dilakukan sejak dulu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan aktivitas masyarakat pesisir.(Warta Cendana Edisi VII no.1. 2011. 2014 : 17-18).

Meskipun kegiatan penanaman dan rehabilitasi mangrove di NTT masih terbatas, namun kehadiran WII dengan melibatkan beberapa pihak seperti dinas-dinas terkait lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Peikanan, BPHM serta masyarakat setempat terus aktif terlibat dalam penanaman mangrove sehingga diharapkan dapat mengimbangi laju pemanfaatanya. Wilayah NTT memiliki keragaman jenis mangrove yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena sebaran wilayah yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau dengan karakter wilayahnya masing-masing sehingga memungkinkan ditumbuhi mangrove dengan ragam jenis yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Berdasarkan data BPHM wilayah I Bali pada 2011 kondisi hutan mangrove di NTT cukup memprihatinkan, sebagian besar mengalami kerusakan dengan tingkatan yang berbeda, yaitu : sebanyak 8.285,10 ha atau 20,40% (kategori rusak berat), 19.552,44 ha atau 48,14% (kategori rusak ringan) dan 12.776,57 ha atau 31,46% (kategori baik). Data ini menunjukan bahwa tekanan terhadap hutan mangrove sangat tinggi karena hanya sepertiga dari total luas hutan mangrove yang masih dalam kondisi baik, selebihnya telah mengalami kerusakan sebagai dampak dari berbagai bentuk pemanfaatan(Warta Cendana Edisi VII no.1. 2011. 2014 : 17-18).

Kabupaten Sikka merupakan sebuah Kabupaten di pulau Flores, yang berada didalam wilayah Propinsi NTT dengan ibu kota Maumere. Secara geografis Kabupaten Sikka terletak pada 8o22’– 8o50’ LS dan 121o55’40” – 122o41’30” BT, dengan luas wilayah 1.731,92 Km2. Di daratan Kabupaten Sikka

berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ende, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Menurut data penduduk pemerintah NTT pada 2007 jumlah penduduk Kabupaten Sikka adalah 277.627 orang. Wilayah Administrasi terdiri dari 21 kecamatan, 147 desa dan 13 kelurahan. Prasarana Transportasi terdapat Bandara Waioti dan untuk transportasi laut terdapat Pelabuhan Laut Sadanggui. (http://kupang.bpk.go.id/ diakses pada 02/04/16).

Kabupaten Sikka memiliki sumberdaya alam yang lebih didominasi oleh sumberdaya alam pesisir. sumberdaya hutan mangrove, sumberdaya terumbu karang, sumberdaya ikan dan sumberdaya hutan. Kabupaten Sikka juga kaya akan mineral yang berasal dari gunung api dan dari sumber daya laut. kondisi ini juga membawa dampak negatif karena memungkinkan penduduknya menghadapi ancaman gempabumi darat maupun laut. Daratan Flores di bagian selatan berhadapan dengan samudera Hindia dan lempeng Australia, yang pergerakan lempeng didasar laut ini dikhawatirkan menyebabkan gempa bumi dan memicu terjadinya tsunami. Demikian pula gempa bumi bawah laut yang dapat terjadi di pesisir utara Flores, khususnya Maumere. Gempa bumi diwilayah ini juga dapat memicu terjadi tsunami, yang kedatangannya dipesisir wilayah ini hanya beberapa menit saja setelah gempa bumi. Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Sikka yang seharusnya bisa menjadi pelindung pertama saat bencana seperti tsunami semakin terkikis. Kabupaten Sikka merupakan kawasan dengan tingkat resiko tsunami yang cukup tinggi karena daerah ini berada dekat dengan zona subduksi lempeng tektonik Australia dan Eurasia serta dipengaruhi oleh sesar-sesar aktif di

sepanjang Pulau Flores. Dalam sejarahnya, sejak 1896 hingga 2008 telah terjadi setidaknya 14 kejadian gempabumi di kabupaten Sikka yang menyebabkan tsunami. Kejadian terparah adalah di tahun 1992, dimana gempabumi berkekuatan 6,8 skala richter hingga menyebabkan tsunami dan menelan korban jiwa lebih dari 2000 jiwa. (http://kupang.bpk.go.id/ diakses pada 02/04/16).

Di Indonesia keterlibatan NGO dalam imlementasi *sustainable development* cukup besar. Walaupun konsep tersebut tidak lagi baru di Indonesia namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Salah satu NGO yang aktif di Indonesia dalam penerapan konsep *sustainable development* adalah *Wetlands International Indonesia (WII).* WII adalah bagian dari jaringan global *Wetlands International*, yang merupakan Organisasi Non-Pemerintah dan bekerja secara global, regional, nasional hingga lokal untuk mencapai tujuan konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana, sebagai bentuk sumbangan bagi terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan. menurut Konvensi Ramsar lahan basah dapat diartikan sebagai lahan yang secara alami atau buatan selalu tergenang, baik secara terus-menerus ataupun musiman, dengan air yang diam ataupun mengalir. Air yang menggenangi lahan basah dapat berupa air tawar, payau dan asin. Tinggi muka air laut yang menggenangi lahan basah yang terdapat di pinggir laut tidak lebih dari 6 meter pada kondisi surut. Program-program yang dilakukan WII berusaha keras untuk melawan penyebab kehilangan dan kerusakan lahan basah. Lahan basah mencakup hutan gambut dan hutan bakau serta semua ekosistem yang terdapat didalamnya.

WII, semula bernama *Asian Wetlands Bureau (AWB).* AWB telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1987 atas dasar *Memorandum of*

Understanding (MoU) antara *Wetlands International* dengan Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). AWB yang semula berdiri sendiri, pada tahun 1995, bersama organisasi sejenis yaitu *International Waterfowl and Wetland Reasearch Bureau (IWRB)* dan *Wetland for the Americas (WA),* melebur diri menjadi *Wetlands International* dimana organisasi dengan nama baru ini membuka kesempatan kepada Pemerintah Negara-Negara untuk bergabung menjadi anggota. Dengan surat no.1659/Menhut-VI/95 tanggal 17 November 1995 Menteri Kehutanan menyatakan Indonesia bergabung menjadi anggota *Wetlands International*. Pada November 1997 ditandatangani MoU yang baru antara Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam (PHPA) dengan *Wetlands International* yang menjadi landasan tetap beroperasinya WII di Indonesia dengan nama *Wetlands International - Indonesia Programme*, namun pada 2014 berubah nama menjadi WII. MoU ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan perpanjangan otomatis 1 (satu) tahun untuk proses evaluasi dan perpanjangan. Untuk mendukung pencapaian misinya, WII selalu dan akan terus bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan yang terkait, termasuk institusi-institusi pendidikan, media maupun sektor swasta. (http://wetlands.org/ diakses pada 27/02/16).

WII merupakan cabang *Wetlands International (WI)* di Indonesia dan merupakan satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nirlaba internasional yang mendedikasikan diri pada restorasi dan konservasi lahan basah. WI sangat menaruh perhatian pada hilang dan rusaknya lahan basah seperti danau,

rawa dan sungai yang tersebar diseluruh dunia. Visi WI adalah terciptanya dunia dimana lahan basah merupakan harta karun yang tidak terkira dan terus dirawat karena kecantikannya, kehidupan yang didukungnya serta berbagai sumber daya yang disediakannya. WI berdedikasi untuk memelihara dan merestorasi lahan basah untuk berbagai nilai lingkungan serta jasa lingkungan yang disediakannya bagi masyarakat. Kantor pusat WI berada di Belanda. WI bekerja pada tingkat lapangan untuk mengembangkan dan memobilisasi berbagai pengetahuan, dan menggunakan berbagai pengalaman praktis untuk mengadvokasi guna terwujudnya kebijakan yang lebih baik. WII juga berhasil mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif dan mengembangkan teknik yang sesuai dengan kondisi lingkungan. (http://wetlands.org/ diakses pada 27/02/16).

Menurut data WII melalui Warta Konservasi Lahan Basa 2013 Luas hutan bakau pesisir Teluk Maumere Kabupaten Sikka saat ini adalah 574.96 ha. Substrat ekosistem bakau di pesisir Teluk Maumere didominasi oleh pasir dan bebatuan (koral) dengan sedikit lumpur. Hutan bakau teridentifikasi tersebar di 8 kecamatan dan 21 desa. Antara tahun 1997 hingga 2012, lebih dari 50 % hutan bakau pesisir Teluk Maumere mengalami kerusakan dan perubahan status penggunaan lahan. Berdasarkan analisis spasial secara visual, di beberapa lokasi di Teluk Maumere teridentifikasi kondisi ekosistem hutan bakau sebelum dan sesudah bencana Tsunami tahun 1992. Secara umum, luas ekosistem hutan bakau berkurang cukup signifikan akibat bencana tsunami tahun 1992. Analisis secara visual dengan menggunakan citra Landsat menunjukkan penurunan luas ekosistem hutan bakau antara tahun 1990 hingga 2000. Penurunan luas dan kualitas ekosistem hutan bakau meningkatkan tingkat kerawanan bencana pesisir di kawasan Teluk

Maumere Kabupaten Sikka. Karakteristik lingkungan pesisir Teluk Maumere (iklim, topografi, geologis, substrat tanah, dan hidro-oseanografi) sangat dinamis dan beberapa dari parameter tersebut rentan terhadap perubahan dan kerusakan. (http://wetlands.org/ diakses pada 27/02/16).

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kawasan pesisir Teluk Maumere sangat rawan terhadap bencana pesisir. Bencana pesisir yang pernah terjadi dan beberapa mungkin akan terus terjadi, seperti gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, subsiden, gelombang angin seperti badai dan putting beliung, erosi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir. Abrasi pantai terjadi secara terus menerus hampir di sebagian besar wilayah pesisir Teluk Maumere. Masyarakat menganggap bahwa abrasi pantai semakin sering terjadi dan terasa perubahannya paska bencana tsunami tahun 1992 lalu. Gelombang angin besar atau angin topan dan puting beliung biasanya terjadi pada musim hujan antara bulan februari hingga maret dan melanda hampir semua wilayah kecamatan. Dalam skripsi ini, peneliti memperoleh referensi dari berbagai karya tulis, untuk dapat diperoleh persamaan serta perbedaannya. Salah satu karya tulis yang berjudul *"Efektivitas Pengelolahan Kawasan Konservasi Lahan Basa Pesisir Indonesia"* yang ditulis oleh Muhammad Ilman dan merupakan karya tulis yang meneliti tentang betapa pentingnya fungsi lahan basah yaitu sebagai sebuah sistem pendukung kehidupan yang mulai mengalami kerusakan, sehingga konservasi perlu dilakukan. Penelitian dilakukan pada 23 kawasan konservasi dengan menggunaka pendekatan *Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Areas Management (RAPPAM)* yang sesuai dengan kebijakan nasional. Hasil RAPPAM menunjukkan bahwa 23 kawasan konservasi yang diteliti memiliki nilai biologis maupun ekonomis tinggi

tetapi sebagian besar kawasan konservasi tersebut belum dikelola secara efektif. Beberapa diantara kawasan konservasi tersebut mengalami tekanan dan ancaman yang tinggi yang mengarah pada kerusakan kawasan konservasi dalam jangka panjang. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menekankan akan pentingnya lahan basah, perbedaannya adalah dalam bidangnya, skripsi peneliti lebih spesifik dan membahas mengenai bagaiman peranan WII di Indonesia melalui konservasi lahan basah yang dilakukan di Kabupaten Sikka dengan cara merehabilitasi ekosistem di daerah pesisir serta pemanfaatanya.

Karya tulis yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu dalam kaitannya pelestarian wilayah pesisir yaitu "*Peran WI-IP Dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias"* yang ditulis oleh Nike Qisthiarini. Dalam skripsi ini membahas hal yang sama yaitu tentang peran NGO sebagai salah satu aktor dalam masyarakat internasional tentu memiliki peran yang strategis guna mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu NGO yang turut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah WII melalui proyek-proyek yang telah dilaksanakanya. Lebih spesifik dapat dilihat dalam *proyek Green Coast* yang merupakan proyek rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemanfaatanya agar dapat terus diperdayakan oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peran dan strategi WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir. Yang membedakan adalah wilayah yang diteliti. Skripsi ini mengambil wilayah Aceh-Nias sedangkan penulis mengambil wilayah NTT-Sikka.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian, yaitu dalam kaitannya pelestarian wilayah pesisir yaitu melalui buku

yang yang berjudul“*Mangroves Siak & Kepulauan Meranti”*. Buku ‘Mangroves Siak dan Kepulauan Meranti’ ini ditulis untuk memberikan spirit dan image di internal bahwa perusahaan Energi Mega Persada (EMP) serius dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove. Dengan upaya serius yang dilakukan secara berkelanjutan, tentu akan mendorong banyak orang untuk melanjutkan upaya pelestarian yang sama. Dalam buku ini dibahas mengenai pentingnya peran mangrove. Dikatakan bahwa mangrove mampu memulai kehidupan di tempat yang sangat susah, miskin hara, keras, dan sebagainya. Dan ketika sudah tumbuh, dia akan mengajak tanaman-tanaman bakau lain untuk ikut tumbuh. Tanaman bakau hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia bermanfaat untuk menahan abrasi, menjadi sumber kehidupan, pelindung kehidupan, dan tempat berkembangbiak kehidupan, maka hutan bakau harus dijaga. Sedangkan pada penelitian ini penulis juga ingin menyampaikan hal yang sama mengenai pentingnya peranan hutan bakau namun, jika dalam buku ini studi kasunya di Siak dan kepulauan Meranti maka penulis mengambil studi kasusnya di wilayah NTT, kabupaten Sikka.

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Peranan Wetlands International Indonesia (WII) dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kabupaten Sikka - Propinsi Nusa Tenggara Timur”

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain:

1. Organisasi Internasional yang merupakan fokus kajian peneliti menyangkut keterlibatan Organisasi Internasional. Didalam matakuliah ini

peneliti mempelajari mengenai bagaimana peranan aktor yang terlibat dalam interaksi antar Negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global. WII sebagai Organisasi Internasional berupaya mengoptimalkan perananya.

2. *Environmental Issues* merupakan fokus kajian peneliti menyangkut tentang masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap global, misalnya pentingnya konservasi ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat diatas maka, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peranan Wetlands Internasional Indonesia dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka – Propinsi Nusa Tenggara Timur?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir Kabupaten Sikka - Propinsi NTT?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka - Propinsi NTT?

3. Bagaimana perkembangan ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka - Propinsi NTT pasca rehabilitasi?

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada peranan WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka yang bertujuan untuk memberi pembelajaran dan penghubungan dalam memperkuat kapasitas serta kerjasama yang diimplementasikan dalam bentuk gabungan antara kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat setempat termasuk upaya-upaya penciptaan matapencaharian alternatif guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembatasan waktu yaitu mulai 2012 hingga tahun 2015.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peranan Wetlands International Indonesia melaui langkah-langkah yang dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur serta perkembanganya pasca rehabilitasi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka NTT?

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka-NTT?
3. Untuk mengetahui perkembangan ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka-NTT pasca rehabilitasi

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai kerjasama internasional di dalam Hubungan Internasional, berbagai macam masalah yang terjadi di Negara berkembang. Menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional, menjelaskan berbagai fenomena terkait upaya pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dengan benar serta kerjasama suatu Negara dengan Organisasi Internasional.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.